

## **NOTULA**

### **Pembahasan Usulan RAN OGI 2020-2022**

#### **Tata Kelola Data dalam Mendorong Pencapaian SDGs**

Hari, Tanggal : Jum'at, 2 Oktober 2020  
Pukul : 14.00 – 15.00 WIB  
Tempat : Zoom Meeting Room  
Agenda : Pembahasan Usulan RAN OGI  
Peserta : 1. Direktorat SPPEPP Bappenas  
2. Tim PWYP  
3. Tim Sekretariat Nasional OGI  
4. Tim Satu Data Indonesia

## **II. Diskusi**

1. Kepala Sekretariat Nasional OGI menyampaikan paparan terkait Open Government Indonesia
  - a. OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melakukan praktik Kemitraan Pemerintahan Terbuka (Open Government Partnership), yang telah dimulai sejak tahun 2012. Melalui OGI, Pemerintah berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk melahirkan ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional.
  - b. OGI telah mengeluarkan 5 rencana aksi dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Di tahun 2020, sedang berlangsung penyusunan rencana aksi yang akan diimplementasikan di tahun 2021-2022. Rencana aksi OGI tidak bersifat menambah program baru, tapi meningkatkan dampak dari program yang sudah ada. Saat ini, usulan rencana aksi sedang dalam tahap penajaman dengan K/L terkait. Setelah itu, rencana aksi akan didiskusikan bersama dengan mitra pembangunan dan melalui tahap konsultasi publik sebelum diserahkan ke OGP di bulan Desember 2020.
2. Perwakilan PWYP memberikan paparan terkait usulan Tata Kelola Data dalam Mendorong Pencapaian SDGs sebagai berikut:

- a. Harapannya Satu Data Indonesia dapat terintegrasi hingga level desa.
  - b. PWYP sudah mendampingi NTB dalam proses pembautan Satu Data daerah. Namun, kendala yang ada adalah standarisasi definisi Satu Data. Adanya *blueprint* dapat membantu advokasi PWYP hingga di level *grassroot*. Dengan demikian, Satu Data NTB harapannya bisa dikaitkan dengan Satu Data nasional.
  - c. Saat ini, PWYP sudah membantu pemerintah NTB, Aceh, dan Jawa Tengah.
  - d. Tata kelola data desa bisa masuk ke dalam *milestone* daerah.
3. Bapak Heri selaku perwakilan Dit. SPPEPP Bappenas menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
- a. Masalah yang ingin diselesaikan terkait Satu Data sudah diatur dalam Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data.
  - b. Di dalam struktur Satu Data, ada sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) di bawah Pak Oktorialdi. SPPEPP dalam hal ini merupakan sekretaris Satu Data
  - c. Di bulan Desember 2020 nantinya, *milestone* dan *blueprint* penetapan standar data sudah selesai dikerjakan.
4. Bapak Oscar selaku perwakilan Satu Data Indonesia menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
- a. Adanya kolaborasi CSO dapat mempercepat pencapaian SDI.
  - b. Output yang diusulkan PWYP yakni *Blueprint serta milestone perencanaan, pelaksanaan dan monitoring Kebijakan Satu Data Nasional* sudah *on progress* dan akan selesai akhir tahun ini.
  - c. Output dapat diubah menjadi adanya *rencana aksi di tingkat daerah melalui pilot project di beberapa daerah seperti NTB dan Aceh*.
  - d. Terkait data desa, SDI sudah membuat referensi tingkat kota/kabupaten untuk asistensi penyusunan regulasi desa.
  - e. Terkait SDGs, sudah ada daftar data setiap tahun terkait SDGs, namun daftar data SDGs tersebut harus diselaraskan dengan RPJMN.
  - f. *Blueprint* Satu Data di tingkat nasional sudah mengatur SDI di daerah juga.

### III. Tindak Lanjut

1. Output usulan komitmen diubah menjadi *Mendorong adanya rencana aksi di tingkat daerah melalui pilot project di beberapa daerah seperti NTB dan Aceh.*
2. Tim CSO akan mengadakan rapat untuk mengusulkan daerah-daerah yang bisa menjadi *pilot project.*

### IV. Dokumentasi

